

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Ahmad Yani, 2013, *Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, 2018, *Pokok – Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Depok
- Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang Tahun 2022
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang, 2022, *Indikator Ekonomi Kota Padang Tahun 2021*, Padang
- Bambang Sugono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- C, Goedhart, 1973, *Garis – Garis Besar Ilmu Keuangan Negara*, Terjemahan: Ratmoko, Penerbit Jembatan, Jakarta
- Diana Sari, 2016, *Konsep Dasar Perpajakan*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2022, *Modul Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Jakarta
- Enny Nurbaningsih, 2019, *Problematika Pembentukan Peraturan Daerah Aktualisasi Wewenang Mengatur dalam Era Otonomi Luas*, Rajawali Pers, Depok
- H, Bohari, 2012, *Pengantar Hukum Pajak*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- H.M. Aries Djaenuri, 2012, *Hubungan Keuangan Pusat – Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Marihot P Siahaan, 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, 2017, *Hukum Keuangan Negara: Teori Dan Praktik*, Rajawali Pers, Jakarta

Phaureula Artha Wulandari, Emy Iryanie, 2016, *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta

Rotistua Pandiangan, 2015, *Hukum Pajak*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta

Sarundajang, 2002, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Harapan, Jakarta

Simatupang, Dian Puji N., 2011, *Paradoks Rasionalitas; Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*, Badan Penerbit FHUI, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Depok

_____ dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Timbul Hamonangan Simanjuntak, Mukhlis, 2012, *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*, Penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta

Yusnani Hasyimzoem, dkk, 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2008 Tentang Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah

C. Skripsi / Tesis / Disertasi

Aisyah Sharifa, 2020, *Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagai Kebijakan Keuangan Negara Akibat Keadaan Darurat Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020*, Skripsi Universitas Indonesia, Depok

Haykal, 2021, *Sistem Pengelolaan Keuangan Negara Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020*, Skripsi Universitas Andalas, Padang

Nisa Vera, 2020, *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Laba Bumud Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh*, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Reza Dwi Fadilla KN, 2019, *Strategi Badan Pendapatan Daerah Dalam Penerapan Pajak Restoran di Kota Padang*, Skripsi Universitas Andalas, Padang

Siti Khoiriah, 2012, *Konstruksi Hukum Kewenangan Kepala daerah dalam Keuangan Daerah di Indonesia*, Tesis Universitas Indonesia, Depok

Welda Misra Rahayu, 2022, *Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Penjualan Pulsa Di Kota Padang*, Skripsi Universitas Andalas, Padang

D. Jurnal

- Ari Wibowo, I Gusti Ayu K. R. H, Agus Riehwanto, 2018, “*Kebijakan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi Terminal di Kabupaten Sukoharjo*”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 6, No. 1
- Faisal Akbar Nasution, 2011, “*Kebijakan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca Reformasi*”, Jurnal Hukum, Vol. 18, No. 3
- Edward H, 2016, “*Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*”, Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja, Vol. XLII, No. 1
- Hikmatul Fitri, 2022, “*Melihat Lebih Jauh Skema Opsen Pajak Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang HKPD*”, Ekonomi dan Keuangan Budget Issue Brief, Vol. 02, Ed. 05
- Liswatin, 2022, “*Inovasi Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Konawe*”, Sibatik Journal, Vol. 1, No. 3
- Muhammad Kamal, 2019, “*Hubungan Pemerintahan Daerah Dalam Mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014*”, SIGn Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1
- Nengah Suastika, 2021, “*Tata Cara Pemungutan Pajak dalam Perspektif Hukum Pajak*”, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 7, No. 1
- Nopyandri, 2015, “*Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 1
- Poni Sukaesih Kurniati, 2013, “*Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia Pada Era Reformasi*”, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Volume. III No. 1

E. Website dan Sumber Lainnya

- Ahmad Warson dalam http://repository.radenintan.ac.id/1612/4/12. BAB_III.pdf, diakses 15 Februari 2023, jam 23.11 WIB
- Bapenda Padang, *Sejarah Singkat*, <https://bapenda.padang.go.id/?p=16> , diakses pada 26 Januari 2023, jam 11.27 WIB
- JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*,

<https://jdih.maritim.go.id/id/hubungan-keuangan-antara-pemerintah-pusat-dan-pemerintah-daerah>, diakses pada 05 Oktober 2022, jam 0.47 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/pajak> , diakses 15 Februari 2023, jam 23.30 WIB.

Kemenkeu Learning Center, *Pola Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/klc1-pusknpk-pola-hubungan-keuangan-pemerintah-pusat-dan-pemerintah-daerah/detail/> , diakses pada 05 Oktober 2022, jam 14.00 WIB

Kompas, *Ubah Pendekatan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/06/12/judul-10> , diakses 07 Oktober 2022, jam 09.24 WIB

